

ISSN	2961-7456 (e)
	2962-8576 (p)



**Membangun Generasi Antikorupsi: Internalisasi Akhlakul Karimah
dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah
Tsanawiyah Sebagai Solusi Holistik**

Nova yanti

novayanti14111974@gmail.com

Ahmad zulfa

ahmadzulfa290923@gmail.com

Imelia puspita ningrum

Puspitaimelia0@gmail.com

Irma sari

irmasariiii1234@gmail.com

irna dhea syafitri

irnadhea406@gmail.com

Abstract: *This study aims to answer the research question of how the internalization of moral values in Islamic Religious Education (AKHLA) learning at Islamic Junior High Schools (Madrasah Tsanawiyah) can become a holistic strategy in building an anti-corruption generation, encompassing the forms of moral values instilled, the integration process in learning activities, and their effectiveness in shaping student character. This study used a qualitative method with a case study approach, through learning observations, in-depth interviews with teachers and students, and analysis of curriculum documentation to comprehensively explore the practice of internalizing moral values in the context of formal education. The results show that the internalization of moral values carried out systematically, through teacher role models, habituation, and reinforcement of Islamic Religious Education (PAI) materials, can build students' moral awareness, thus potentially becoming a holistic solution in preventing corrupt behavior from an early age.*

Keywords: *Internalization of Moral Values, Islamic Religious Education, and Holistic Strategy.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana internalisasi akhlakul karimah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah dapat menjadi strategi holistik dalam membangun generasi antikorupsi, mencakup bentuk nilai-nilai moral yang ditanamkan, proses integrasi dalam kegiatan pembelajaran, serta efektivitasnya dalam membentuk karakter siswa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi pembelajaran, wawancara mendalam dengan guru dan siswa, serta analisis dokumentasi kurikulum untuk menggali secara komprehensif praktik internalisasi nilai akhlak dalam konteks pendidikan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi akhlakul karimah yang dilakukan secara sistematis, melalui keteladanan guru, pembiasaan, dan penguatan materi PAI, mampu membangun kesadaran moral siswa sehingga berpotensi menjadi solusi holistik dalam pencegahan perilaku koruptif sejak dini.

Kata kunci : **Internalisasi Akhlakul Karimah, Pendidikan Agama Islam dan Strategi Holistik.**

Pendahuluan

Membangun generasi antikorupsi merupakan sebuah ikhtiar filosofis untuk mengembalikan manusia kepada jati diri yang bermoral. Dalam perspektif filsafat nilai, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi bentuk kehancuran etika ketika manusia gagal menata keinginan, gagal memaknai amanah, dan terperangkap dalam materialisme. Di sinilah pentingnya Pendidikan Agama Islam (PAI), bukan sebagai mata pelajaran doktrinal, tetapi sebagai sarana membangun *kesadaran moral transcendental*.(Candra, 2023)

Dalam kerangka filsafat moral, tindakan korupsi mencerminkan kehancuran struktur batin manusia: hilangnya rasa malu (*al-haya'*), runtuhnya kejujuran (*al-shidq*), serta melemahnya rasa takut kepada konsekuensi moral dan spiritual. Korupsi bukan sekadar penyimpangan administratif, tetapi *krisis eksistensial* yang memutus hubungan manusia dengan nilai kebenaran (*al-haqq*). Ketika amanah tidak lagi dimaknai sebagai tanggung jawab yang sakral, ia berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Oleh sebab itu, agenda membangun generasi antikorupsi harus dimulai dari mengembalikan makna amanah sebagai panggilan moral yang melekat pada identitas manusia.(Sahabuddin & Sakum, 2024)

Di sinilah Pendidikan Agama Islam (PAI) memainkan peran transformatif, bukan sebagai pelajaran dogmatis, tetapi sebagai jalan pembudayaan akhlak. PAI yang filosofis tidak hanya menanamkan hafalan ayat dan hukum, tetapi memampukan peserta didik melakukan *internalisasi nilai* melalui proses berpikir kritis, refleksi moral, dan peneladanan etis. PAI harus menjadi ruang dialog antara nilai-nilai transendental dan realitas sosial, sehingga peserta didik memahami bahwa korupsi bukan sekadar dosa sosial, tetapi kegagalan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan, manusia, dan diri sendiri. Melalui pendekatan ini, PAI menjadi instrumen pembentukan karakter yang konstruktif dan sadar diri. (Febriana, 2021)

Membangun generasi antikorupsi hanya dapat dicapai melalui *internalisasi akhlakul karimah* yang berkelanjutan. Nilai-nilai seperti amanah, adil, jujur, qana'ah, dan tanggung jawab harus ditanamkan bukan hanya melalui pembelajaran kognitif, tetapi pembiasaan, keteladanan, dan budaya madrasah yang integratif. Ketika nilai menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter menjadi budaya, maka ekosistem pendidikan akan melahirkan generasi yang kokoh menghadapi godaan kekuasaan dan materialisme. Dengan pendekatan holistik ini, PAI tidak hanya mengajarkan moralitas, tetapi membentuk manusia yang mampu menolak korupsi bukan karena takut diawasi, tetapi karena telah menemukan martabat dirinya sebagai insan bermoral. (Baroroh, 2024)

Akhlakul karimah bukan sekadar “ajaran”, tetapi *habitus* moral yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak. Dengan menjadikan PAI sebagai ruang penghayatan nilai, bukan hanya penghafalan, peserta didik ditempa menjadi pribadi yang melihat kejujuran sebagai martabat, bukan sekadar aturan; amanah sebagai ibadah, bukan sekadar kewajiban administratif; dan integritas sebagai identitas diri, bukan topeng sosial.

Berdasarkan penelusuran menggunakan pendekatan Publish or Perish, ditemukan 135 artikel yang relevan dengan tema membangun generasi antikorupsi. Artikel-artikel tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai antikorupsi telah berkembang cukup pesat dalam dua dekade terakhir, baik dalam konteks pendidikan, psikologi moral, ilmu sosial, maupun kajian keagamaan. Namun, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penelitian yang secara khusus mengkaji pembangunan generasi antikorupsi di sekolah masih relatif terbatas dibandingkan bidang lainnya. (Widodo, 2019)

Secara umum, artikel-artikel tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama:

Pertama kajian teoretis tentang perilaku koruptif ada (± 40 artikel) menempatkan korupsi sebagai fenomena moral, sosial, dan struktural yang dipengaruhi oleh penyimpangan etika, lemahnya sistem pengawasan, budaya permisif, dan ketidakadilan sosial. Berbagai penelitian menegaskan bahwa perilaku koruptif berakar pada kegagalan internalisasi nilai sejak dini, sehingga pendidikan nilai menjadi aspek fundamental yang harus diperkuat dalam proses pendidikan. Fokus kajian ini lebih bersifat konseptual dan analitis dalam menjelaskan konstruksi perilaku korupsi sebagai gejala moral yang kompleks. (Ramadhani, 2024)

Kedua kajian mengenai pendidikan antikorupsi pada level kebijakan dan perguruan tinggi ada (± 55 artikel) menunjukkan dominasi riset yang membahas implementasi program antikorupsi di kampus, integrasi mata kuliah antikorupsi, penguatan etika akademik, dan posisi perguruan tinggi sebagai moral agent. Selain itu, penelitian juga menyoroti kebijakan nasional seperti pendidikan karakter, kurikulum antikorupsi, serta program KPK. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa penelitian lebih banyak berorientasi pada tingkat makro dan pendidikan tinggi, sementara fokus pada sekolah dasar dan menengah masih sangat terbatas. (Febriana, 2021)

Ketiga penelitian dalam pendekatan psikologi moral dan penguatan karakter (± 25 artikel) mengungkap pentingnya moral reasoning, pembiasaan lingkungan, keteladanan, dan proses habituation dalam membentuk integritas. Meskipun memberikan fondasi teoritis yang kuat, mayoritas artikel dalam kategori ini belum secara langsung mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan praktik pendidikan antikorupsi di sekolah. Fokus kajian lebih mengarah pada teori perkembangan moral dan psikologi umum daripada implementasi pedagogis.

Ke empat kategori integrasi pendidikan agama, nilai moral, dan antikorupsi (± 15 artikel) merupakan kelompok yang paling sedikit jumlahnya. Penelitian-penelitian dalam kategori ini membahas peran nilai-nilai agama, terutama Islam, seperti amanah, sidq, adil, dan iffah sebagai basis pembentukan perilaku antikorupsi. Namun, sebagian besar kajian masih bersifat normatif-teologis dan belum banyak menghubungkan nilai agama dengan strategi konkret penerapan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah.

Hal ini menunjukkan adanya ruang besar untuk penelitian yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Upaya membangun generasi antikorupsi di sekolah masih tergolong minim dan belum menjadi arus utama dalam proses pendidikan di Indonesia. Meskipun isu korupsi telah menjadi persoalan bangsa yang serius serta mendapat perhatian dari berbagai lembaga negara, implementasi pendidikan antikorupsi pada level sekolah belum berjalan optimal. Kurikulum yang ada memang mencantumkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin, tetapi belum dikembangkan secara sistematis sebagai program pendidikan antikorupsi yang terstruktur dan terukur. (Ramadhani, 2024)

Minimnya upaya ini tampak dari beberapa aspek. Pertama, sebagian besar sekolah hanya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai materi tambahan, bukan sebagai bagian inti dari pembentukan karakter peserta didik. Guru pun sering kali tidak mendapatkan pelatihan khusus mengenai metode pedagogis untuk menginternalisasi nilai antikorupsi secara konkret dalam aktivitas belajar. Akibatnya, penguatan integritas di sekolah cenderung bersifat normatif, belum menyentuh pembentukan kesadaran moral yang mendalam.

Kedua, penelitian mengenai pembangunan generasi antikorupsi di tingkat sekolah masih sangat terbatas. Berbagai studi yang dipublikasikan lebih banyak berfokus pada kebijakan antikorupsi, transparansi birokrasi, atau pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Sementara itu, kajian yang menyoroti bagaimana sekolah dasar dan menengah dapat menjadi ruang strategis untuk membangun budaya antikorupsi masih jarang. Kekurangan penelitian ini menyebabkan kurangnya model dan strategi pembelajaran yang dapat menjadi rujukan bagi guru dan sekolah. (Heryadi & Bashori, 2022)

Ketiga, lingkungan sekolah belum sepenuhnya menjadi ekosistem yang mendukung perilaku antikorupsi. Praktik seperti ketidakjujuran akademik, budaya permisif terhadap pelanggaran kecil, hingga minimnya keteladanan dari berbagai unsur sekolah turut melemahkan upaya pembentukan integritas sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya diajarkan sebagai teori, tetapi harus diwujudkan dalam kultur sekolah yang konsisten. (Salna et al., 2023)

Secara keseluruhan, minimnya program, penelitian, dan ekosistem pendukung menunjukkan bahwa pembangunan generasi antikorupsi di sekolah masih berada pada

tahap awal. Padahal, sekolah merupakan tempat paling strategis dalam membentuk karakter dasar peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru yang mengintegrasikan pendidikan nilai, pendidikan agama, dan pembiasaan etis untuk menciptakan generasi yang memiliki integritas, kejujuran, dan kemampuan moral untuk menolak segala bentuk korupsi.

Kajian mengenai antikorupsi telah banyak dibahas dalam konteks hukum, kebijakan publik, dan kajian sosial-politik. Namun, penelitian mengenai pembangunan generasi antikorupsi sejak usia sekolah masih menghadirkan ruang kosong yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu menekankan pentingnya regulasi, penegakan hukum, dan penguatan institusi negara, tetapi belum banyak yang menawarkan model pendidikan yang terintegrasi secara mendalam dalam proses pembelajaran di sekolah. Celah inilah yang menjadi landasan kebaruan penelitian ini. (Heryadi et al., 2021)

Novelty utama terletak pada pendekatan pendidikan karakter yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan pedagogis secara simultan. Penelitian sebelumnya umumnya memandang pendidikan antikorupsi sebagai pengetahuan yang diajarkan melalui ceramah dan penyampaian aturan. Sementara itu, penelitian ini menawarkan model internalisasi nilai yang berfokus pada pembiasaan, keteladanan, penguatan budaya sekolah, serta integrasi nilai-nilai keagamaan khususnya akhlakul karimah sebagai basis pembangunan karakter antikorupsi. (Kawung & Tuwo, 2024)

Di samping itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada pemahaman bahwa pendidikan antikorupsi harus dimulai dari level mikro, yaitu ranah emosi, kesadaran moral, dan pembentukan kebiasaan, bukan hanya pada level kognitif. Hal ini masih jarang dieksplorasi secara mendalam dalam penelitian sebelumnya, yang cenderung menitikberatkan pada pengetahuan tentang korupsi, bukan pada pembentukan moral agency peserta didik.

Penelitian ini juga menghadirkan novelty melalui pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan pendidikan agama Islam, psikologi moral, dan pedagogi modern sehingga menghasilkan model pembentukan generasi antikorupsi yang lebih holistik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan teori, tetapi juga solusi praktis tentang bagaimana sekolah dapat menjadi ruang strategis untuk membangun integritas sejak dini. (Dewi, 2023)

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam wacana pembangunan generasi antikorupsi yakni model pendidikan berbasis nilai, spiritualitas, dan pembiasaan yang dapat diterapkan secara langsung dalam ekosistem sekolah.

Alasan Penelitian Memilih Judul Membangun Generasi Antikorupsi didasarkan pada urgensi dan relevansi persoalan korupsi yang hingga kini masih menjadi salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan bangsa. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak struktur sosial, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat munculnya masyarakat yang berintegritas. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa pencegahan korupsi harus dimulai sejak dini melalui pembangunan karakter generasi muda (Suprihno & Rohmawati, 2025).

Alasan Pertama, Korupsi telah menjadi persoalan struktural yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa, sehingga upaya membangun generasi antikorupsi merupakan kebutuhan mendesak. Tindak korupsi bukan hanya mencerminkan lemahnya pengawasan, tetapi juga kegagalan dalam pembentukan karakter sejak dini. Karena itu, pendidikan karakter yang menanamkan nilai integritas perlu diperkuat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tanpa upaya terencana, perilaku koruptif akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. (Warahmah et al., 2023)

Korupsi sebagai persoalan struktural dan pentingnya pendidikan karakter sejak dini Alasannya: Korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu yang menyimpang, tetapi sering muncul karena sistem yang lemah, budaya permisif, dan ketidaktegasan hukum. Ketika korupsi sudah menjadi kebiasaan yang dianggap “biasa”, generasi berikutnya akan menirunya sebagai hal yang wajar. Oleh karena itu, pembentukan karakter sejak dini menjadi penting untuk menanamkan nilai kejujuran sebelum anak terpengaruh oleh budaya koruptif. Tanpa pendidikan karakter yang kuat di keluarga, sekolah, dan masyarakat, perilaku koruptif akan terus direproduksi secara turun-temurun. (Febriana, 2021)

Alasan Kedua, Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk menanamkan nilai antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal, generasi muda dapat dibekali pemahaman kritis tentang dampak korupsi, nilai kejujuran, tanggung jawab, serta keberanian menolak kecurangan. Tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan; peserta didik perlu dilatih pada ranah

sikap dan perilaku agar tumbuh sebagai pribadi yang menjunjung etika. Dengan cara ini, pendidikan menjadi benteng utama pencegahan korupsi.(Widodo, 2019)

Pendidikan sebagai sarana efektif menanamkan nilai antikorupsi alasannya: Pendidikan memberikan ruang terstruktur bagi peserta didik untuk memahami konsep kejujuran, tanggung jawab, dan dampak buruk korupsi. Pendidikan bekerja melalui tiga ranah: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan (psikomotorik). Jika pendidikan hanya menekankan teori tanpa latihan sikap, nilai antikorupsi tidak akan terinternalisasi. Pendidikan formal (sekolah), nonformal (pelatihan, organisasi), dan informal (keluarga) mampu menciptakan lingkungan belajar yang konsisten, sehingga generasi muda memperoleh pemahaman menyeluruh tentang integritas dan keberanian menolak kecurangan.(Ramadhani, 2024)

Alasan Ketiga, Keteladanan menjadi aspek penting dalam pembangunan generasi antikorupsi. Anak dan remaja belajar paling efektif melalui contoh nyata, bukan sekadar teori. Jika guru, orang tua, dan pemimpin di lingkungan sosial menunjukkan perilaku jujur dan disiplin, generasi muda akan lebih mudah meniru dan mempraktikkan nilai tersebut. Sebaliknya, inkonsistensi antara ucapan dan tindakan orang dewasa dapat melemahkan upaya pendidikan antikorupsi. Oleh sebab itu, keteladanan moral harus berjalan beriringan dengan pendidikan nilai.

Pentingnya keteladanan dalam pembentukan generasi antikorupsi alasannya: Secara psikologis, anak dan remaja belajar melalui observasi. Mereka meniru perilaku yang ditampilkan figur otoritas seperti orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Jika mereka melihat contoh nyata kejujuran dan kedisiplinan, nilai itu akan lebih mudah tertanam dibanding sekadar mendengar nasihat. Sebaliknya, ketika orang dewasa mengajarkan kejujuran tetapi berperilaku sebaliknya (misalnya melakukan pungli kecil atau manipulasi), anak akan kebingungan dan menganggap teori hanya sekadar formalitas. Oleh karena itu, keteladanan moral konsisten adalah kunci keberhasilan pendidikan antikorupsi.(Sari, 2025)

Alasan Keempat, Membangun generasi antikorupsi juga membutuhkan dukungan sistem sosial yang mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan budaya malu terhadap perilaku koruptif. Lingkungan yang bersih dari praktik pungli, kecurangan kecil, dan penyalahgunaan wewenang akan menjadi ruang belajar yang kuat bagi generasi muda. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan

ekosistem yang sehat demi menghadirkan generasi yang tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk melawannya. Dengan sinergi berbagai pihak, Indonesia dapat melahirkan generasi berintegritas yang siap menjaga masa depan bangsa. (Febriana, 2021)

Pentingnya dukungan sistem sosial dan budaya antikorupsi alasannya: Individu tidak hidup dalam ruang kosong; perilakunya dipengaruhi lingkungan sosial. Lingkungan yang penuh pungli, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang dapat menormalisasi perilaku koruptif. Sebaliknya, jika lingkungan menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya malu terhadap kecurangan, generasi muda akan tumbuh dalam sistem yang mendukung nilai-nilai integritas. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat harus bekerja secara kolektif untuk menciptakan ekosistem yang bebas korupsi. Sinergi ini penting agar pendidikan nilai tidak berjalan sendiri, tetapi diperkuat oleh sistem sosial yang sehat.

Selain itu, pemilihan judul ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menghadirkan kontribusi ilmiah dan praktis. Secara ilmiah, penelitian ini memperkaya kajian tentang pendidikan karakter dan pencegahan korupsi berbasis pendidikan. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan dapat membantu sekolah dan pemangku kebijakan dalam merancang program atau strategi pendidikan antikorupsi yang lebih efektif. (Febriana, 2021)

Fenomena korupsi di Indonesia masih menjadi fakta sosial yang sulit dihapuskan karena telah mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, pungutan liar, hingga budaya “asal ada uang, urusan beres” sering dianggap lumrah. Ironisnya, perilaku tersebut tidak hanya terjadi pada elite pejabat, tetapi juga merembes dalam kehidupan sehari-hari, misalnya melalui kebiasaan mencontek, mencari jalan pintas, atau manipulasi data. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi persoalan budaya dan karakter yang membentuk pola pikir masyarakat sejak dini. (Widodo, 2019)

Di lingkungan pendidikan, fakta sosial menunjukkan bahwa sebagian peserta didik belum memiliki kesadaran kuat tentang bahaya korupsi. Nilai kejujuran kadang dikalahkan oleh tekanan untuk mendapat nilai tinggi, sehingga praktik mencontek atau memalsukan tanda tangan orang tua dianggap hal kecil. Padahal, perilaku kecil yang diabaikan itulah yang dapat berkembang menjadi tindakan koruptif di masa depan.

Minimnya keteladanan dari sebagian orang dewasa, baik di rumah maupun di sekolah, semakin memperkuat sikap permisif terhadap perilaku tidak jujur.

Membangun generasi antikorupsi membutuhkan perubahan paradigma bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, disiplin, dan kejujuran melalui pembiasaan dan teladan. Program pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari kurikulum dan budaya sekolah, bukan sekadar materi tambahan. Ketika siswa diajak memahami dampak korupsi, mempraktikkan kejujuran, serta melihat teladan nyata di lingkungan mereka, maka proses internalisasi nilai berlangsung lebih efektif. (Ramadhani, 2024)

Upaya membangun generasi antikorupsi tidak bisa hanya mengandalkan lembaga pendidikan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama: keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Lingkungan sosial yang bersih, transparan, dan memberi penghargaan pada perilaku jujur akan memperkuat karakter generasi muda. Ketika berbagai elemen masyarakat bergerak serempak menciptakan budaya integritas, maka lahirlah generasi yang berani berkata benar, menolak kecurangan, dan menjaga amanah. Inilah jalan panjang menuju masa depan bangsa yang lebih bersih, bermartabat, dan bebas dari korupsi. (Aggrean et al., 2024)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam proses internalisasi akhlakul karimah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah sebagai upaya membangun generasi antikorupsi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengungkap makna, pengalaman, dan praktik nyata yang berlangsung di lingkungan pendidikan. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap aktivitas pembelajaran, wawancara mendalam dengan guru PAI, kepala madrasah, dan siswa, serta studi dokumentasi terhadap kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan program pembiasaan akhlak. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi internalisasi nilai-nilai akhlak serta kontribusinya terhadap pembentukan karakter antikorupsi siswa.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

1.pendidikan karakter yang menanamkan nilai integritas perlu diperkuat di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Penelitian ini menemukan bahwa integritas sebagai nilai moral inti tumbuh paling kuat ketika pesan moral yang diberikan di sekolah dikonsolidasikan di rumah dan diperkuat dalam praktik sosial masyarakat. Di tingkat keluarga, pola asuh yang konsisten termasuk keteladanan orang tua, komunikasi terbuka, dan aturan rumah yang menekankan kejujuran menjadi fondasi awal pembentukan integritas anak; tanpa fondasi ini, intervensi sekolah cenderung bersifat temporer. Temuan ini sejalan dengan penelitian internasional yang menekankan peran krusial keluarga dalam menanamkan nilai sosial dan kebiasaan moral sejak dini.

Di ranah sekolah, pendidikan karakter yang efektif menggabungkan pengajaran nilai eksplisit (mis. diskusi etika, kurikulum PPKn/PPs), pembiasaan praktis (mis. aturan anti-plagiarisme, sistem absensi transparan), dan keteladanan guru serta kepemimpinan sekolah kombinasi ini membentuk kultur sekolah yang mendukung konsistensi antara ucapan dan tindakan. Analisis teoretis menggunakan Teori Ekologi Bronfenbrenner dan Teori Pendidikan Karakter (Lickona) menunjukkan bahwa interaksi antar-sistem (mikrosistem keluarga, meso-hubungan keluarga sekolah, eksosistem masyarakat) menjelaskan mengapa program karakter di sekolah yang berdiri sendiri kurang berkelanjutan tanpa dukungan luas. Studi empiris juga menunjukkan bahwa revitalisasi kearifan lokal dan praktik pedagogis yang terintegrasi dapat memperkuat internalisasi nilai menjadikan integritas bukan sekadar materi, melainkan budaya praktik.

Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui program kemitraan sekolah-warga, kegiatan sosial, dan teladan dari tokoh lokal berfungsi sebagai arena praktik moral di luar konteks formal; masyarakat yang memberikan reward sosial terhadap perilaku jujur dan menegakkan norma anti-koruptif memperbesar peluang anak mempertahankan perilaku integritas di usia dewasa. Meta-temuan dari kajian karakter dan penelitian pengukuran kompetensi sosial-emosional menunjukkan bahwa intervensi yang menghubungkan SEL (social-emotional learning) dengan pendidikan karakter meningkatkan hasil perilaku jangka panjang, khususnya bila dilaksanakan serempak oleh keluarga, sekolah, dan komunitas. Oleh karena itu, rekomendasi praktis penelitian ini menekankan integrasi kebijakan dan program: (1) pelatihan orang tua dan

komunikasi sekolah-keluarga; (2) kurikulum karakter yang praktik-berorientasi; dan (3) kemitraan aktif dengan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang konsisten menegakkan nilai integritas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanaman nilai integritas pada peserta didik merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh tiga lingkungan utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Data lapangan memperlihatkan bahwa banyak perilaku tidak berintegritas yang muncul pada remaja seperti ketidakjujuran akademik, manipulasi tugas, atau sikap tidak bertanggung jawab berakar pada lemahnya internalisasi nilai di lingkungan terdekat mereka. Temuan ini sejalan dengan Teori Ekologi Perkembangan Bronfenbrenner, yang menjelaskan bahwa karakter tidak dibentuk oleh satu faktor tunggal, tetapi oleh interaksi berlapis antara mikrosistem (keluarga), mesosistem (hubungan keluarga–sekolah), dan eksosistem (masyarakat). Dengan demikian, pendidikan integritas tidak cukup hanya diimplementasikan melalui kurikulum sekolah, tetapi membutuhkan kesinambungan nilai antara rumah, ruang kelas, dan lingkungan sosial.

Di lingkungan keluarga, penelitian mendapati bahwa integritas anak sangat dipengaruhi oleh modeling atau keteladanan orang tua. Keluarga yang menerapkan komunikasi terbuka, memiliki aturan rumah yang konsisten, dan menjunjung nilai kejujuran seperti tidak memanipulasi informasi, tidak berbohong di depan anak, serta menunjukkan tanggung jawab dalam pekerjaan lebih berhasil menanamkan integritas sejak dini. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terindeks Scopus (misalnya pada jurnal *Children and Youth Services Review* dan *Journal of Moral Education*) yang menegaskan bahwa keterlibatan emosional orang tua, pola asuh demokratis, dan konsistensi perilaku orang dewasa berhubungan erat dengan tingkat moralitas dan perilaku prososial anak. Penelitian internasional tersebut juga menekankan bahwa anak yang tumbuh dalam keluarga yang permisif terhadap kebohongan kecil (misalnya “white lies”) cenderung membawa pola tersebut ke dalam perilaku akademik, seperti mencontek atau menghindari tanggung jawab.

Sementara itu, peran sekolah sebagai agen pendidikan formal menjadi medan penting untuk memperkuat nilai integritas melalui kurikulum, budaya sekolah, dan keteladanan guru. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sekolah yang menerapkan kultur integritas secara menyeluruh melalui aturan anti-plagiarisme, ketertiban administrasi,

transparansi nilai, dan konsistensi penerapan tata tertib lebih berhasil menumbuhkan perilaku jujur dan bertanggung jawab dibanding sekolah yang hanya memberikan materi secara teoritis. Analisis ini sejalan dengan Teori Pendidikan Karakter Lickona, yang menekankan tiga komponen utama dalam pembentukan karakter: *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*. Hasil observasi juga menemukan bahwa keteladanan guru memiliki pengaruh paling besar; siswa lebih mudah meniru perilaku jujur dan disiplin ketika melihat guru menerapkan integritas dalam keputusan, cara mengajar, dan pengelolaan kelas. Temuan ini konsisten dengan studi terindeks Scopus seperti di jurnal *Teaching and Teacher Education*, yang menekankan bahwa keteladanan guru merupakan prediktor utama internalisasi nilai moral pada remaja.

Berdasarkan keseluruhan data dan analisis teori, penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai integritas tidak tumbuh secara otomatis dari kurikulum sekolah, tetapi dari ekosistem sosial yang konsisten, yaitu ketika keluarga menyediakan fondasi moral, sekolah memperkuatnya dengan pendidikan formal dan keteladanan, dan masyarakat mengaktualisasikannya melalui norma sosial yang mendukung. Sinergi tiga lingkungan utama ini terbukti menentukan kekuatan karakter integritas anak di masa depan. Karena itu, rekomendasi penelitian menekankan pentingnya program kolaboratif antara rumah, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan karakter yang berkelanjutan dan menyeluruh.

2. Pendidikan merupakan sarana paling efektif untuk menanamkan nilai antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan

Pendidikan memainkan peranan sentral dan bersifat fundamental dalam upaya pencegahan korupsi karena ia mampu membentuk pengetahuan, sikap, dan kebiasaan moral sejak usia dini secara sistematis dan berkelanjutan. Dari perspektif teori pembelajaran dan pembangunan karakter, proses internalisasi nilai tidak terjadi hanya lewat satu atau dua pertemuan melainkan melalui pengulangan, penegasan norma, dan praktik sosial yang konsisten dalam kurikulum, pembiasaan sekolah, serta interaksi sosial sehari-hari. OECD dalam laporannya tentang *Education for Public Integrity* menekankan tiga pendekatan utama mainstreaming materi integritas ke dalam kurikulum, pelatihan guru dan pengembangan bahan ajar, serta keterlibatan aktor non-sekolah sebagai kerangka kebijakan untuk mendesain program pendidikan integritas yang efektif.

Secara empiris, studi-studi evaluasi program pendidikan antikorupsi menunjukkan bahwa intervensi pendidikan yang terstruktur dapat meningkatkan *knowledge*, *attitude*, dan niat perilaku anti-korupsi pada peserta didik, terutama bila program tersebut bersifat aktif-partisipatif (diskusi kasus nyata, role play, proyek pelayanan masyarakat) dan diikuti komponen evaluasi yang memadai. Misalnya, evaluasi program anti-korupsi yang terukur melaporkan peningkatan pemahaman dan komitmen anti-korupsi di antara siswa setelah mengikuti modul terstruktur, serta pengurangan perilaku oportunistik (seperti mencontek atau manipulasi administrasi) dalam jangka pendek. Namun temuan kajian sistematis juga mencatat bahwa efek jangka panjang bergantung pada kesinambungan program, dukungan lingkungan (keluarga & komunitas), dan kualitas implementasi (pelatihan guru, materi yang relevan, dan monitoring).

Dari sisi teoritis, kombinasi Teori Pendidikan Karakter (Lickona) dan Teori Ekologi Perkembangan (Bronfenbrenner) memberi landasan kuat mengapa pendidikan ketika dirancang holistik efektif menanamkan integritas. Lickona menekankan bahwa pendidikan karakter harus mencakup *moral knowing* (apa yang benar), *moral feeling* (mengapa peduli), dan *moral action* (bagaimana bertindak). Bronfenbrenner menambahkan bahwa pembentukan perilaku etis anak dipengaruhi oleh interaksi bertingkat antara microsystem (keluarga, guru), mesosystem (hubungan keluarga-sekolah), dan eksosistem (norma komunitas, kebijakan publik). Kajian literatur mutakhir menegaskan hal ini dan merekomendasikan pendekatan multi-level yang menggabungkan pendidikan formal, melibatkan orang tua, dan inisiatif komunitas.

3. Keteladanan menjadi aspek penting dalam pembangunan generasi antikorupsi.

Keteladanan—baik yang ditunjukkan oleh guru, kepala sekolah, orang tua, maupun tokoh masyarakat—berperan sebagai pemicu utama dalam proses internalisasi nilai integritas pada anak dan remaja. Keteladanan menciptakan “sumber belajar” yang konkret: perilaku nyata yang dapat diamati, ditiru, dan diukur oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika figur otoritas konsisten antara ucapan dan tindakan (mis. berkata jujur dan juga transparan dalam pengelolaan sumber daya), pesan moral yang disampaikan menjadi kredibel dan memudahkan proses adopsi nilai oleh generasi muda.

Secara teoritik, fenomena ini dapat dipahami melalui Social Learning Theory Albert Bandura yang menegaskan bahwa banyak aspek perilaku sosial dipelajari melalui observasi, modeling, dan imitasi terhadap orang lain serta melalui kerangka character

education Thomas Lickona yang menekankan bahwa pembentukan karakter efektif bila nilai diajarkan (*moral knowing*), dirasakan (*moral feeling*), dan dipraktekkan (*moral action*) dalam konteks dimana anak melihat contoh nyata. Dengan kata lain, keteladanan menyediakan komponen *moral action* yang membuat pembelajaran nilai tidak sekadar deklaratif, tetapi menjadi praktik yang dapat direplikasi oleh peserta didik.

Bukti empiris dari studi terindeks menunjukkan pengaruh kuat keteladanan terhadap hasil pendidikan karakter dan komitmen anti-korupsi. Penelitian kualitatif kontemporer tentang bagaimana guru menjadi role model menunjukkan bahwa guru yang mengadopsi perilaku etis, transparansi, dan konsistensi disiplin memfasilitasi perkembangan motivasi internal siswa untuk bertindak jujur efek yang terlihat baik pada sikap maupun perilaku praktis (mis. penurunan kecenderungan mencontek, penepatan tanggung jawab administrasi). Studi tentang implementasi program role-modelling pada konteks pendidikan juga menemukan bahwa strategi role-modelling yang dirancang (pelatihan teacher-model, penguatan nilai di rutin sekolah, refleksi terarah) meningkatkan kemungkinan internalisasi nilai jangka menengah.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, literatur yang mengevaluasi program-program formal menyatakan bahwa keteladanan institusional mis. transparansi pengelolaan dana sekolah, konsistensi sanksi terhadap pelanggaran, dan perilaku integritas dari pimpinan sekolah adalah faktor penentu apakah materi antikorupsi akan berbuah perilaku nyata. Studi kajian praktik anti-korupsi di pendidikan menegaskan bahwa tanpa keteladanan dari “lingkar dalam” institusi pendidikan, modul dan kegiatan antikorupsi berisiko hanya menjadi ritual pendidikan yang tidak berkelanjutan; sebaliknya, ketika keteladanan menjadi bagian dari budaya sekolah dan dikuatkan oleh keluarga serta komunitas, efek program jauh lebih langgeng. Hal ini didukung oleh penelitian-penelitian pengkajian anti-korupsi di ranah sivik/pendidikan yang menunjukkan korelasi antara praktik teladan dan peningkatan sikap anti-koruptif pada siswa.

Dari perspektif praktik kebijakan, implikasi pentingnya jelas: penguatan keteladanan harus menjadi bagian integral desain program pendidikan antikorupsi bukan sekadar modul ajar. Rekomendasi berbasis bukti meliputi: (1) pelatihan dan pembinaan guru agar menjadi role model etis (menggabungkan refleksi etis, manajemen konflik kepentingan, dan transparansi), (2) kebijakan institusional yang menuntut keterbukaan

pengelolaan sumber daya sekolah serta akuntabilitas pimpinan, (3) mekanisme monitoring yang mengukur perilaku (bukan hanya pengetahuan), dan (4) program kolaboratif yang menyinergikan keteladanan guru dengan praktik teladan orang tua dan tokoh komunitas sehingga siswa menerima pesan nilai yang konsisten di semua arena sosial. Implementasi langkah-langkah ini memungkinkan keteladanan berfungsi bukan hanya sebagai inspirasi individual tetapi sebagai penguat budaya anti-korupsi yang sistemik.

Keteladanan merupakan pondasi paling fundamental dalam pembangunan karakter integritas dan antikorupsi, sebab karakter tidak hanya dipelajari melalui instruksi, tetapi melalui pengamatan, pengalaman, dan interaksi langsung dengan figur-figur signifikan di lingkungan sosial anak. Dalam kajian pendidikan moral, integritas tidak dapat dikonstruksi secara instan, melainkan terbentuk melalui proses internalisasi nilai yang berlangsung secara bertahap dan berulang. Ketika anak menyaksikan perilaku jujur, disiplin, transparan, dan bebas konflik kepentingan dari guru, orang tua, dan tokoh masyarakat, terjadi proses *modeling* yang memperkuat nilai moral dari ranah kognitif menuju ranah afektif dan konatif. Nilai integritas yang abstrak menjadi konkret melalui tindakan nyata yang dapat disaksikan, dinilai, dan ditiru. Dengan demikian, keteladanan menyediakan landasan psikologis dan sosial yang menjadikan pendidikan antikorupsi bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses pembiasaan moral.

Secara teoretis, gagasan ini dijelaskan oleh Social Learning Theory (Bandura) yang menyatakan bahwa sebagian besar perilaku manusia dipelajari melalui pengamatan terhadap orang lain dan kemudian meniru perilaku tersebut. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, teori ini menekankan bahwa anak akan menunjukkan perilaku jujur bukan karena diminta untuk jujur, tetapi karena mereka melihat figur otoritatif melakukan kejujuran secara konsisten. Selain itu, Theory of Moral Development (Kohlberg) menunjukkan bahwa perkembangan moral individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang menyediakan pengalaman moral nyata. Anak akan naik menuju tahap moral yang lebih tinggi bila dikelilingi figur yang memberi contoh keputusan etis yang rasional dan konsisten. Keteladanan juga diperkuat oleh Teori Pendidikan Karakter Lickona, yang memandang karakter sebagai perpaduan pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral dimana tindakan moral sangat bergantung pada contoh nyata dari lingkungan.

Dukungan empiris dari artikel terindeks internasional (Scopus dan penerbit bereputasi) memperlihatkan bahwa keteladanan guru dan lingkungan sekolah merupakan prediktor kuat perilaku integritas siswa. di tingkat keluarga, penelitian internasional yang membahas *parental role modeling* menegaskan bahwa perilaku orang tua adalah variabel terkuat dalam pembentukan integritas anak. Ketika orang tua menunjukkan transparansi dalam penggunaan uang, kepatuhan terhadap aturan, atau tidak melakukan “jalan pintas” yang tidak etis, anak cenderung meniru pola ini hingga dewasa. Sebaliknya, ketika anak melihat praktik koruptif “skala kecil” di rumah, seperti manipulasi informasi, penghindaran kewajiban, atau suap informal, nilai integritas menjadi sulit terbentuk meskipun sekolah memberi pendidikan antikorupsi yang baik.

Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner menunjukkan bahwa perilaku moral anak dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan: keluarga, sekolah, kelompok sebaya, media, institusi sosial, hingga norma masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang memberikan teladan integritas akan memperkuat pembelajaran moral sehingga tercipta konsistensi nilai antara *microsystem* (keluarga–sekolah) dan *exosystem* (masyarakat).

Dalam praktiknya, pembangunan keteladanan sebagai strategi antikorupsi harus melibatkan beberapa komponen. Pertama, penguatan kapasitas guru dan pemimpin sekolah melalui pelatihan integritas, manajemen nilai, dan resolusi dilema etis. Kedua, penerapan budaya anti-korupsi dalam operasional sekolah misalnya transparansi penggunaan anggaran sekolah, sistem reward punishment yang adil, serta penerapan aturan yang konsisten. Ketiga, kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk menghadirkan teladan yang konsisten lintas lingkungan. Keempat, penyediaan ruang diskusi reflektif bagi siswa agar mereka dapat mengidentifikasi nilai moral dari keteladanan yang mereka saksikan. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai antikorupsi bukan hanya menjadi pengetahuan pasif yang dihafal, tetapi menjadi kompas moral yang dihidupi dalam perilaku.

Dengan demikian, keteladanan tidak hanya menjadi pelengkap pendidikan antikorupsi, tetapi merupakan elemen inti yang menentukan efektivitas internalisasi nilai. Pendidikan yang baik tanpa keteladanan akan kehilangan kekuatannya, sementara keteladanan tanpa pendidikan sistematis akan sulit menjadi budaya kolektif.

Membangun generasi antikorupsi membutuhkan harmonisasi keduanya: teori yang benar, lingkungan yang konsisten, dan figur-figur yang menjadi contoh nyata integritas.

4. Membangun generasi antikorupsi juga membutuhkan dukungan sistem sosial yang mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan budaya malu terhadap perilaku koruptif.

Upaya membangun generasi antikorupsi pada dasarnya merupakan proses sosialisasi nilai yang tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan sosial. Pendidikan di sekolah mengajarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, namun nilai-nilai tersebut tidak akan tertanam secara mendalam tanpa didukung oleh sistem sosial yang memperkuat pesan moral tersebut. Bila lingkungan sosial mengirimkan sinyal yang bertentangan misalnya praktik nepotisme dalam masyarakat, budaya “asal aman”, atau toleransi terhadap korupsi kecil maka pendidikan antikorupsi akan kehilangan otoritas moralnya.

Dalam kerangka itu, keterbukaan (transparency) menjadi elemen pertama yang berfungsi sebagai jendela sosial terhadap praktik institusi. Transparency International secara konsisten menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik mampu menurunkan peluang korupsi dengan memotong ruang gelap bagi manipulasi. Dalam konteks pendidikan karakter, keterbukaan bukan sekadar aspek administratif, tetapi menjadi sumber keteladanan struktural yang diamati siswa. Ketika sekolah membuka laporan penggunaan dana, menunjukkan mekanisme evaluasi guru, atau mengumumkan proses penilaian secara terbuka, siswa melihat bahwa nilai antikorupsi bukan sekadar teori dalam buku, tetapi prinsip yang dijalankan dalam sistem.

Selanjutnya, akuntabilitas (accountability) berfungsi sebagai lapisan berikutnya dalam memperkuat integritas sosial. Akuntabilitas di sini mencakup sistem pelaporan, audit, penindakan, serta alur tanggung jawab yang jelas. Dalam konteks pendidikan antikorupsi, akuntabilitas memberi pesan sosial bahwa “pelanggaran itu ada konsekuensinya”, sehingga nilai etis bukan hanya ajaran, tetapi aturan hidup yang dipatuhi bersama. Sistem akuntabilitas yang berjalan menjadi sinyal yang memperkuat internalisasi nilai pada generasi muda.

Dimensi lain yang sangat penting adalah budaya malu (culture of shame) terhadap perilaku koruptif. Kajian perilaku sosial dalam jurnal-jurnal psikologi sosial internasional (misalnya *Social Psychological and Personality Science*, jurnal-jurnal

perilaku organisasi, dan moral psychology research) menunjukkan bahwa rasa malu adalah “moral emotion” yang mampu menahan seseorang dari perilaku menyimpang ketika norma sosial di sekitarnya menolak tindakan tersebut. Di sinilah tantangan generasi masa kini: mereka hidup dalam masyarakat yang tidak jarang memperlihatkan contoh ketidakjujuran yang diterima sebagai bagian dari “cara hidup”, sehingga perlu upaya besar untuk memulihkan norma malu secara kolektif.

Sebuah tinjauan literatur dari berbagai artikel internasional dalam bidang governance dan anti-corruption policy menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi hanya efektif dalam jangka panjang ketika didukung oleh perubahan konteks sosial. Tanpa dukungan tersebut, pendidikan hanya menciptakan kesadaran, tetapi tidak membentuk karakter. Generasi muda dapat mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi tanpa dukungan sosial, mereka berpotensi mengikuti praktik yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan antikorupsi memerlukan sinergi tiga pilar: pendidikan, sistem sosial, dan budaya masyarakat. Sekolah mengajarkan nilai, sistem sosial menyediakan struktur, dan budaya menyediakan norma yang mengikat secara moral.

Lebih jauh, literatur psikologi moral dan penelitian sosial modern menunjukkan bahwa generasi muda membangun sikap antikorupsi melalui modeling (Bandura), pembiasaan, dan observasi sosial jangka panjang. Akhirnya, berbagai penelitian internasional menegaskan bahwa sebuah bangsa hanya dapat membangun generasi antikorupsi bila melakukan transformasi sosial secara menyeluruh: menguatkan transparansi, menegakkan akuntabilitas, dan menghidupkan kembali budaya malu sebagai norma kolektif. Ketika ketiga unsur itu bekerja serempak, nilai antikorupsi bukan hanya menjadi pengetahuan atau teori, tetapi menjadi budaya hidup yang diwariskan lintas generasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi akhlakul karimah dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Tsanawiyah merupakan strategi holistik dan efektif dalam membangun generasi antikorupsi sejak dini. Internalisasi nilai tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan moral, tetapi juga sebagai pembentukan karakter yang menyentuh dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa.

Akhirnya, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi dunia pendidikan dengan menghadirkan model internalisasi nilai yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi aplikatif dan kontekstual, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi madrasah maupun sekolah umum dalam membangun generasi yang jujur, berintegritas, dan memiliki kesadaran moral kuat untuk menolak segala bentuk korupsi.

Dengan demikian, internalisasi akhlakul karimah dalam pembelajaran PAI merupakan solusi holistik dan strategis dalam upaya membangun generasi antikorupsi yang berkarakter kuat dan siap menjaga masa depan bangsa.

Referensi

- Aggrean, B., Prianti, F. A., Alfarid, M. P., & ... (2024). Peran Pemuda Sebagai Agen Perubahan Dalam Melawan Korupsi. *AL-DALIL: Jurnal*
- Baroroh, U. (2024). Jujur Sejak Dini: Upaya Membangun Fondasi Antikorupsi pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Candra, B. Y. (2023). Kepemimpinan dan kontrol kebijakan: Pembentukan budaya anti korupsi di perguruan tinggi. *Studia Manageria*.
- Dewi, N. (2023). Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*.
- Febriana, M. D. (2021). Implementasi Nilai Pendidikan Antikorupsi Tanggungjawab Jujur dan Disiplin. *Journal of Practice Learning and*
- Heryadi, A., & Bashori, K. (2022). Membangun Generasi Insan Kamil, Generasi Anti Korupsi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.
- Heryadi, A., Yuliasari, H., Ambarwati, D., & ... (2021). Menanamkan Nilai-Nilai Anti Korupsi Sejak Anak Usia Dini Bagi Anggota Kowad Korem 072 Pamungkas. *GERVASI: Jurnal*
- Kawung, J. F., & Tuwo, G. (2024). Membangun Budaya Anti Korupsi Di Kalangan Akademisi: Peran Strategis Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi. ... : *Jurnal Pendidikan Agama*
- Ramadhani, R. (2024). Formation Of Anti-Corruption Character In The Younger Generation Based On Pancasila Ideology. In *JURNAL SETIA PANCASILA*. pdfs.semanticscholar.org.
- Sahabuddin, Z. A., & Sakum, S. (2024). *Membangun Karakter Anti-Korupsi Menggali*

Potensi Generasi Milenial Dan Z Menuju Masyarakat Integritas.
repository.penerbitwidina.com.

Salna, I., Akhiryah, A. F., & ... (2023). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Anak Bangsa.
AMI: JURNAL

Sari, W. P. (2025). Gamifikasi Dalam Pendidikan Integritas: Membangun Budaya Antikorupsi Di Kalangan Pelajar Sma. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia.*

Suprihno, S., & Rohmawati, E. (2025). Membangun Karakter Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi di Era Digital via Media Sosial sebagai Alat Edukasi di Sekolah.
NABAWI: Jurnal Penelitian

Warahmah, U., Nazila, A., & Khatimah, K. (2023). Tanggung Jawab Sebagai Nilai Penting Dalam Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Seumubeuet.*

Widodo, S. (2019). Membangun pendidikan antikorupsi di Sekolah Dasar. In *Jurnal Pendidikan Dasar UNJ.* researchgate.net.